

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian Kesehatan (2015), “Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.”

Menurut Kementerian Kesehatan (2015), “Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.”

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.

Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam

mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Salah satu yang menjadi aspek perhatian kesehatan yaitu pada pintu masuk Negara seperti pelabuhan laut dan Bandar udara. Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, tentang Kepelabuhanan, “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.”

Pelabuhan Kota Gorontalo berjarak 3 km dari pusat Kota Gorontalo dengan koordinat 00°29'59,4" LU/LS dan 123°03'18,7" BT, merupakan pintu gerbang utama transportasi udara yang melayani daerah provinsi Gorontalo dan ibu Kota negara dan Kota provinsi lainnya di wilayah Republik Indonesia.

Kota Gorontalo merupakan salah satu Kota yang mempunyai 3 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut Gorontalo PT Pelindo IV, Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan Perikanan (TPI). Dimana ketiga pelabuhan tersebut merupakan tempat umum yang dapat menjadi pintu masuk (*port de entry*) suatu penyakit termasuk demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo tentang pengamatan jentik *Aedes aegypti* selama tahun 2011-2013 dan 2015 di seluruh wilayah kerjanya, bahwa pelabuhan di daerah Gorontalo

masih mempunyai angka HI dan CI yang sangat tinggi yaitu pada tahun 2011 angka HI sebesar 29,2% dan CI sebesar 17,6%, tahun 2012 angka HI sebesar 0,05% dan CI sebesar 0,014% , tahun 2013 angka HI sebesar 0,5% dan CI sebesar 0,57% dan pada tahun 2015 angka HI sebesar 16% dan CI sebesar 12,5%. Pada perimeter area indikator yang digunakan untuk *House Index* (HI) dan *Container Index* (CI) yaitu 0 dan untuk buffer area ≤ 1 . Dari indikator tersebut maka perimeter area harus bebas dari *Aedes aegypti* baik stadium larva maupun stadium dewasa

Pada laporan KKP Kelas III Gorontalo Tahun 2015 juga diketahui bahwa terdapat keberadaan tikus dan kecoa yang mengganggu di area toilet pelabuhan. Hal ini tentu sangat meresahkan pengunjung pelabuhan selain gangguan estetika juga dikuatirkan akan menumbulkan penyakit yang menimbulkan PHEIC.

Oleh karena itu keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui orang, alat angkut, barang termasuk kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. KKP mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356 Tahun 2008 dalam pasal 2 yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/ bandara dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.

Pada perimeter area Pelabuhan penyeberangan maupun Pelabuhan Kota Gorontalo PT PELINDO IV juga menjadi tanggungjawab dari masing-masing pengelola pelabuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan wawancara mendalam dengan otoritas pengelola pelabuhan tersebut untuk menggambarkan pengendalian vektor di pelabuhan Kota Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka berbagai masalah yang timbul adalah :

1. Berdasarkan laporan tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terlihat bahwa angka *House Index* (HI) dan *Countainer Index* (CI) di pelabuhan Kota Gorontalo ≥ 0
2. Berdasarkan laporan KKP Kelas III Gorontalo Tahun 2015 juga diketahui bahwa terdapat keberadaan tikus dan kecoa yang mengganggu di area toilet pelabuhan Kota Gorontalo. Kejadian ini tentu sangat meresahkan selain gangguan estetika juga dkuatirkan akan menumbulkan penyakit yang menimbulkan PHEIC.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan berbagai kondisi di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah Bagaimana gambaran pelaksanaan pengendalian vektor di Pelabuhan laut barang dan penumpang Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menggambarkan pelaksanaan pengendalian vektor di Pelabuhan laut barang dan penumpang Kota Gorontalo

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menggambarkan kebijakan pengendalian vektor di Pelabuhan laut barang dan penumpang Kota Gorontalo
- b. Untuk menggambarkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengendalian vektor di Pelabuhan laut barang dan penumpang Kota Gorontalo
- c. Untuk menggambarkan teknik operasional pengendalian vektor yang dilaksanakan di Pelabuhan laut barang dan penumpang Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi otoritas wilayah Pelabuhan Kota Gorontalo dalam hal pengawasan pelabuhan sehingga menciptakan pelabuhan yang bersih dan sehat.

2. Manfaat bagi Institusi

Hasil ini penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu kesehatan lingkungan.

3. Manfaat bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan sarana pengembangan teori yang telah didapat dalam perkuliahan sehingga dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya di lapangan serta menerapkan ilmu yang diperoleh terhadap keadaan lapangan.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat mengenai masalah pengendalian vektor yang terjadi di lingkungan dan masalah yang akan ditimbulkan.